LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MADIUN

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N M A D I U N

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL.Raya Solo No.71 Jiwan Madiun 63121 Telp. (0351) 462787 / Fax. (0351) 4772992

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Guna mencapai kondisi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2019 yang meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menunjukkan arah yang ingin dicapai dalam periode tahun 2019 - 2023. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang menguraikan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. Dokumen tersebut juga berisi tentang indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2019, selain itu juga program kegiatan dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 dilakukan terhadap sasaran dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 sebagian besar sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun beberapa kekurangan pencapaian target yang belum terpenuhi perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan.

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras dari bidang penanggulangan bencana, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Upaya dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan khusunya bidang penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dan lintas sektor terkait dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.

Madiun, 25 Februari 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN

MUHAMAD ZAHROWI, AP, MH
PembinaTingkat I
NIP. 19750819 199412 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dapat kami susun berkat limpahan rahmat dan hidayahNya dan oleh karena itu puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat umumnya dan dalam mencapai misi, tujuan Instansi Pemerintah khususnya agar tercipta penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aktualisasi dari semangat reformasi utamanya guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 telah melaksanakan Program Kegiatan Rutin maupun Program Kegiatan yang menyentuh langsung pada pelayanan masyarakat mendasar pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun yang sama.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagai media evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, juga untuk mengetahui capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian laporan kami, kritik dan saran guna memaksimalkan penyusunan Laporan maupun pelayanan kepada masyarakat tentunya kami harapkan.

Madiun, 25 Februari 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN

MUHAMAD ZAHROWI, AP, MH
PembinaTingkat I
NIP. 19750819 199412 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang
B Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun
1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Struktur Organisasi
3. Sumberdaya Manusia (SDM)
C Isu – Isu Strategis
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A Rencana Strategis
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Indikator Kinerja
6. Program dan Kegiatan
B Penetapan Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A Capaian Kinerja
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran
B Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan penanggulangan bencana mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.

Sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 mempunyai tanggungjawab untuk :

a. Mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
b. Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah ;
c. Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana ;
d. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana.
e. Memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik :
   - Kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan serta keamanan dan keterlibatan masyarakat ;
   - Infrastruktur / fasilitas umum / sosial yang rusak akibat bencana.

B. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tanggal 8 Nopember 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun didalamnya memuat tugas dan fungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun utamanya Pasal 4 disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Adapun fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termuat di dalam pasal 5, sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisen ;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2. Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam kategori B yang mana Kepala Pelaksana dijabat dari Eselon III yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang dijabat secara rangkap (ex – officio) oleh Sekretaris Daerah.

Sedangkan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat
c. Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan ;
d. Seksi Kedaruratan Dan Logistik ;
e. Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Apabila digambarkan ke dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN

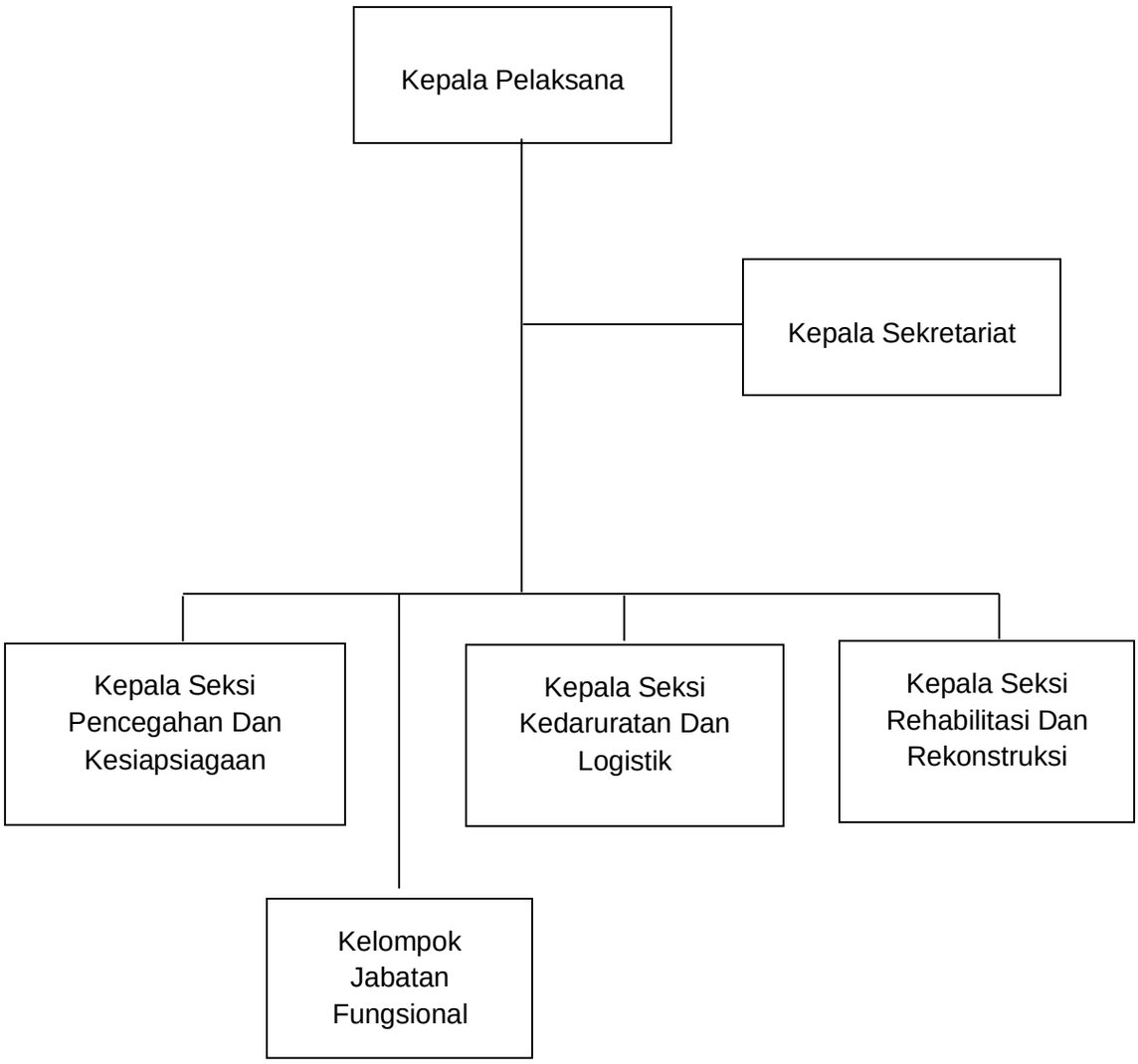

3. Sumberdaya Manusia (SDM)

Di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh faktor kondisi sumberdaya manusia yang secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 15 (lima belas) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

-	Kepala Pelaksana	=	1 orang, Eselon IIIA
-	Kepala Sekretariat	=	1 orang, Eselon IVA
➢	Staf	=	8 orang
-	Kepala Seksi Pencegahan & Kesiapsiagaan	=	1 orang, Eselon IVA
➢	Staf	=	1 orang
-	Kepala Seksi Kedaruratan Dan Logistik	=	1 orang, Eselon IVA
➢	Staf	=	1 orang
-	Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	=	1 orang, Eselon IVA
➢	Staf	=	- orang
	Jumlah	=	15 orang

a.2. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

-	SD	=	- orang
-	SLTP	=	1 orang
-	SLTA	=	5 orang
-	Sarmud / D3	=	- orang
-	S1 (Strata I)	=	8 orang
-	S2 (Strata II)	=	1 orang
	Jumlah	=	15 orang

a.3. Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan

-	Golongan IV	=	1 orang
-	Golongan III	=	9 orang
-	Golongan II	=	4 orang
-	Golongan I	=	1 orang
-	Tenaga Kontrak	=	- orang
	Jumlah	=	15 orang

a.4. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

-	Laki – laki	=	12 orang
-	Perempuan	=	3 orang
	Jumlah	=	15 orang

C. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain :

1 Rendahnya kesadaran atau mininmnya pengetahuan masyarakat tentang pentingya pencegahan dan penanggulangan becana;
2 Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
3 Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
4 Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana;
5 Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli geografi / geologi dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Penganggulangan Bencana Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknessis), peluang (Oportunitis) serta tantangan (Threats). Isu strategis yang akan diangkat :

1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan sinergitas antara BPBD Kabupaten Madiun sebagai koordinator penanggulangan bencana dengan berbagai pihak meliputi lintas OPD, Dunia Usaha, akademisi, media massa, relawan serta masyarakat (Penta Helix);
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pengurangan resiko bencana;
4. Pengembangan Sistem Teknologi dalam mendukung optimalisasi kinerja Penanggulangan Bencana;
5. Memasukan Pengurangan Risiko Bencana sebagai prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI dan MISI KEPALA DAERAH

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai peranan di dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023. Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun dengan tindakan kepedulian dan kemanusiaan melalui penanganan bencana alam.

Visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak "**. Makna dari visi

pembangunan Kabupaten Madiun tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya, politik maupun gangguan ketertiban umum dan bencana, terwujud kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, terwujud kesejahteraan yang berkeadilan serta terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya yang berpedoman pada kearifan lokal dan niai – nilai luhur budaya.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

- Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai peranan di dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah khususnya pada Misi ke 1 “mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun” yaitu dengan menciptakan rasa aman masyarakat di Kabupaten Madiun melalui tindakan kepedulian dan kemanusiaan melalui penanganan bencana alam.

2. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari pernyataan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan visi dan khususnya misi Bupati Madiun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tujuan yaitu **"Mengurangi Risiko Bencana"**.

3. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, ditetapkan sasaran dan indikator yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yaitu **"Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana"**.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGHITUNGAN
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1. Jumlah SDM/Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	Jumlah SDM/Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana
	2. Persentasi kejadian bencana yang tertangani	(jumlah penanganan kejadian bencana / jumlah kejadian bencana) x 100%
	3. Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	(jumlah pelaksanaan rehab rekons / jumlah rencana rehab rekons) x 100%

4. INDIKATOR KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama Kabupaten Madiun dan Target 2020

TUJUAN : Mengurangi Risiko Bencana			
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana			
No	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target 2020**
1	Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	Orang	350
2	Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100
3	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	%	100

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. BPBD menetapkan program programnya sesuai RPJMD periode 2018 – 2023 yaitu :

Program Utama (Teknis)

1. Proram Penanggulangan Bencana.

   Program ini merupakan program utama yang mencakup tiga fase utama dalam penanggulangan bencana yaitu mulai fase pra bencana, saat kejadian bencana hingga fase setelah (pasca) bencana, sehingga program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas utama BPBD. Program ini meliputi kegiatan yaitu :

   a) Kegiatan Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana,
   b) Kegiatan Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana,
   c) Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana,
   d) Kegiatan Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Pada Masa Pandemi Covid - 19,

e) Kegiatan Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana Pada Masa Pandemi Covid – 19.

Program Penunjang

2. Program Pelayanan Kesekretariatan. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :
   a) Kegiatan Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana,
   b) Kegiatan Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal).

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan. Penetapan Kinerja sangat penting untuk dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan program atau kegiatan instansi akan lebih baik, dalam mencapai visi dan misi Bupati.

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Madiun tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagaimana terlampir di Lampiran I.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas maupun pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban tersebut yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis. Di dalam bab ini dijabarkan pencapaian kinerja masing-masing sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020.

Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100	Tidak Tercapai Target	

A. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemda Kabupaten Madiun untuk tahun 2020. Pencapaian Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
			Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja %		
	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana						
1	Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	300 orang	350 Orang	1.500 orang	428%	1.400 Orang	157%
2	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	0%	100%	0%	0%	100%	0%

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka mengungkap dan menguraikan seberapa jauh suatu rencana atau taget kinerja dapat dicapai, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Bagian ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja yang menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis.

Sasaran : *Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana*

Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana merupakan kunci untuk menurunkan resiko yang ditimbulkan akibat dampak kejadian bencana. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menjadikan peningkatan kapasitas sebagai sasaran strategis/utama. Untuk meminimalkan jumlah kerugian yang dapat disebabkan oleh kejadian bencana baik berupa tingkat kerugian, kerusakan maupun jumlah korban jiwa. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan mulai dari tahap pra bencana, saat darurat bencana dan pasca bencana yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penanggulangan Bencana

1) Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaa meliputi berbagai upaya mitigasi yang dilakukan dalam tahap pra bencana untuk meminimalisir risiko bencana dan meningkatkan kapasitas

masyarakat dalam menghadapi bencana. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan pemberian pemahaman mengenai kebencanaan melalui sosialisasi maupun pelatihan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan bencana. Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk pada tahun 2020 yaitu sebanyak 30 desa, dimana 28 desa diantaranya dibentuk secara mandiri oleh desa tersebut dengan didampingi langsung oleh BPBD Kabupaten Madiun sedangkan 2 desa lainnya oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Desa tangguh tersebut meliputi :

Tabel Jumlah Desa Tangguh Bencana Kabupaten Madiun Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa
1	Gemarang	Batok
2		Winong
3		Tawangrejo
4		Gemarang
5		Sebayi
6		Nampu
7	Wonoasri	Jatirejo
8		Banyukambang
9		Sidomulyo
10		Wonoasri
11		Plumpungrejo
12		Bancong
13		Purwosari
14		Klitik
15		Buduran
16	Dagangan	Ketandan
17		Tileng
18		Dagangan
19		Joho
20		Kepet
21		Sewulan
22		Jetis
23		Banjarejo
24		Mruwak
25		Prambon
26		Banjarsari Wetan
27		Banjarsari Kulon
28		Sukosari
29		Padas (APBD Prov. Jatim)
30		Segulung (APBD Prov. Jatim)

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan desa tangguh bencana meliputi sosialisasi mengenai kebencanaan, simulasi penanganan korban bencana serta pembentukan tim – tim penanggulangan bencana dalam lingkup desa. Dengan dibentuknya

desa tangguh bencana ini diharapkan masyarakat memahami tentang kebencanaan, mengerti tentang risiko dan dampak kejadian bencana, dapat memberikan pertolongan pertama pada korban saat terjadi bencana, serta terjaminnya keamanan saat terjadi bencana. Kegiatan ini melibatkan peran aktif dari masyarakat desa, perangkat desa, relawan (Tim Rekasi Cepat), Babinkamtibmas, Babinsa dan trantib kecamatan.

Selain pembentukan desa tangguh, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah yaitu dengan membentuk Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), namun tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi Pandemi Covid – 19.

Optimalisasi pelaksanaan mitigasi bencana juga didukung dengan inovasi penggunaan teknologi informasi yaitu melalui Pembuatan Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi berupa aplikasi *Zero Risk*. Pembuatan website dan aplikasi berbasis Android "*Zero Risk*" ini memliki keunggulan dimana menyediakan layanan informasi dan laporan kebencanaan secara *real time* yang dapat diakses langsung oleh masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kecepatan penanganan bencana di Kabupaten Madiun.

Gambar fitur pada Aplikasi *Zero Risk*

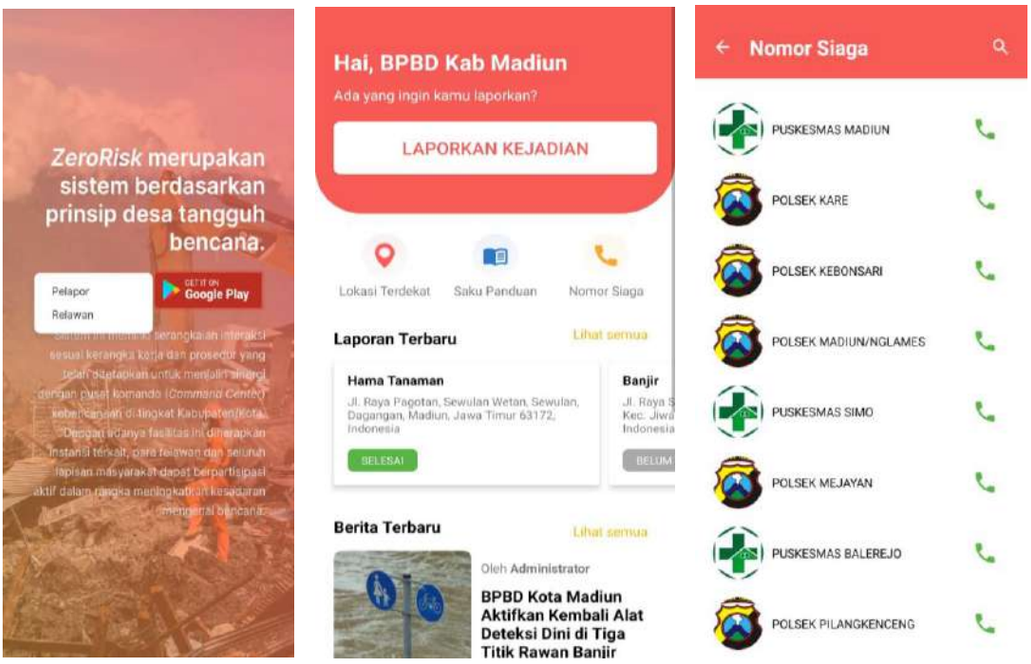

2) Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan posko siaga darurat, penanganan kejadian bencana, pendataann serta pemberian logistik kebencanaan. Pemantauan dilakukan dengan melaksanakan posko siaga darurat dalam rangka antisipasi bencana yaitu terbentuknya kelompok/regu piket yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalop (Pusat Pengendali dan Operasional) Penanggulangan Bencana, dengan adanya kegiatan rutin piket penjagaan posko selama 24 jam penuh sejak bulan Januari hingga Desember, serta khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat puncak musim hujan, pada saat libur hari raya, tahun baru, dan even tertentu. Pelaksanaan kegiatan mulai dari piket jaga, menerima laporan kejadian bencana, pelaksanaan penanganan bencana dan pelaporan kejadian bencana. Laporan kejadian yang masuk segera ditindak lanjuti dengan pengecekan lokasi dan melakukan assesment atau kaji cepat kondisi tanggap darurat, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat setempat, dinas terkait, polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama menangani bencana. Setiap kejadian bencana wajib dilaporkan kepada kepala daerah yaitu Bupati dan instansi vertikal yaitu BPBD Provinsi maupun BNPB, sebagai bentuk tindaklanjut dan dasar untuk pengajuan bantuan bagi korban bencana.

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 84 kejadian di Kabupaten Madiun. Berikut rincian jumlah kejadian masing – masing jenis bencana :

Tabel Rekapitulasi Kejadian Tahun 2020 Kabupaten Madiun

NO	LOKASI BENCANA	2020						
		BANJIR	TANAH LONGSOR	ANGIN PUTING BELIUNG	KEBAKARAN	RUMAH ROBOH	JEMBATAN AMBROL	ORANG TENGGELAM
1	Kebonsari	1						1
2	Geger	1		1	2			
3	Dolopo		2	5	1			
4	Dagangan		5	1	1	1	1	
5	Wungu	3		2	1			

NO	LOKASI BENCANA	2020						
		BANJIR	TANAH LONGSOR	ANGIN PUTING BELIUNG	KEBAKARAN	RUMAH ROBOH	JEMBATAN AMBROL	ORANG TENGGELAM
6	Kare		1					
7	Gemarang		1	1	1			
8	Saradan	4	2		1			
9	Pilangkenceng	4		4				
10	Mejayan			1	1			
11	Wonoasri	4		4		1		
12	Balerejo	4	1					1
13	Madiun	4		5	1			1
14	Sawahan			4				
15	Jiwan	1		1	2			
JUMLAH		**26**	**12**	**29**	**11**	**2**	**1**	**3**

3) Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstrusi penanggulangan bencana seharusnya dengan melakukan pelatihan Jitupasa (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan menghasilkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Namun karena dalam kondisi Pandemi Covid – 19 sehingga tidak dapat dilaksanakan pelatihan, namun hanya sebatas rapat koordinasi terbatas dalam rangka penyusunan dan pengajuan proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir 2019 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam rapat koordinasi melibatkan beberapa SKPD terkait yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan. Kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi dan validasi lapangan oleh Tim BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur. Pengajuan rencana Rehab Rekon di 10 titik lokasi kerusakan pasca bencana, disetujui sebanyak 5 titik lokasi dan pelaksanaannya di tahun 2021.

4) Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Pada Masa Pandemi Covid – 19

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilakukan pada masa pandemi Covid – 19, yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan dalam rangka mendukung percepatan penanganan bencana pada masa pandemi Covid – 19 ini.

5) Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana Pada Masa Pandemi Covid – 19

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana yang dilakukan pada masa pandemi Covid – 19.

Capaian rata-rata kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas penanggulanan Bencana adalah 176% dengan predikat sangat baik. Berikut ini adalah tabel capaian Kinerja Sasaran :

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Maningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	300 orang	350 Orang	1.500 orang	428%	1.400 Orang	157%
2	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	0%	100%	0%	0%	100%	0%
	Rata-rata Capaian Kinerja				176%		

Capaian rata-rata kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana tahun 2020 adalah 176%. Adapun indikator kinerja sasaran tersebut terdiri atas 3 indikator sasaran dengan capaian kinerja masing-masing sebagai berikut :

a) Capaian indikator kinerja utama **Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana** pada tahun 2020 adalah 428%.

Pelatihan penanggulangan bencana diberikan bukan hanya untuk relawan saja tetapi juga masyarakat terutama yang berada di kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan diri sehingga dapat menurunkan tingkat resiko bencana apabila terjadi bencana. Pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat dilakukan melalui pembentukan / pengembangan desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana. Dalam kegaiatan tersebut pelatihan dikemas melalui sosialisasi kebencanaan dan praktek penanganan korban bencana. Pada tahun 2020 ini jumlah desa rawan bencaa yang dikembangkan menjadi desa tangguh bencana yaitu 30 desa dengan masing – masing desa melibatkan 50 orang yang terdiri atas perangkat desa, relawan dan masyarakat desa. Sehingga jumlah keseluruhan sdm/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana pada tahun 2020 adalah 1.500 orang dari target 350 orang sehingga tingkat capaiannya sebesar 428%.

❖ **Faktor Pendukung Keberhasilan :**

- Tingkat kesadaran akan pentingnya penanganan bencana pada relawan/masyarakat cukup tinggi
- Dukungan anggaran dan partisipasi yang tinggi dari pemerintah desa dan provinsi

❖ **Permasalahan :**

Adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid – 19, sehingga anggaran APBD pada BPBD Kabupate Madiun dialokasikan untuk prioritas kegiatan pencegahan penularan Covid – 19.

❖ **Strategi Pemecahan Masalah :**

Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan pembentukan desa tangguh secara mandiri dengan didampingi oleh BPBD serta adanya stimulan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur dengan membentuk 2 desa tangguh bencana di Kabupaten Madiun.

❖ **Rencana Tindak Lanjut :**

Melanjutkan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana di desa rawan bencana lainnya dengan meningkatkan pratisipasi desa. Serta

meningkatkan koordinasi dan sinergisme dengan desa tangguh bencana yang telah terbentuk sehingga dapat bersama sama bersinergi menanggulangi bencana secara optimal.

b) Capaian indikator kinerja **Persentase kejadian bencana yang tertangani** pada tahun 2020 adalah 100%.

Indikator Kinerja tercapai 100% dimana jumlah laporan kejadian bencana yang masuk semuanya mendapatkan penanganan oleh BPBD Kabupaten Madiun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 84 kejadian di Kabupaten Madiun, yaitu meliputi banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, rumah roboh, jembatan ambrol dan kejadian orang tenggelam.

Penanganan bencana di Wilayah Kabupaten Madiun telah dilaksanakan dengan baik oleh BPBD Kabupaten Madiun, dengan segera menindaklanjuti setiap laporan kejadian bencana baik dari masyarakat, pejabatsetempat maupaun para relawan. Setelah mendapat laporan kejadian bencana, tim dari BPBD langsung mengecek lokasi dan segera melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama menangani bencana. Setiap kejadian bencana wajib dilaporkan kepada kepala daerah yaitu Bupati dan instansi diatasnya yaitu BPBD Provinsi maupun BNPB, sebagai bentuk tindaklanjut dan dasar untuk pengajuan bantuan bagi korban bencana.

❖ **Faktor Pendukung Keberhasilan :**

Dalam mencapai target kinerja maka berbagai program dan kegiatan dilaksanakan antara lain :

- Penyediaan sistem pelaporan informasi kejadian bencana melalui beberapa media baik telepon, media masa dan teknologi seperti Whatsapp
- Pelaksanaan piket jaga posko yang disiplin dan 24 jam x 7 hari sehingga setiap ada laporan kejadian bencana dapat langsung ditindaklanjuti
- Adanya peran relawan yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Madiun yang siaga dan tanggap

❖ **Permasalahan :**

Dalam penanganan bencana yang menjadi kendala utama ialah kurangnya peralatan yang memadai dan keterbatasan tenaga sehingga

dapat memperlambat atau menyebabkan penanganan bencana menjadi kurang maksimal.

- **Strategi Pemecahan Masalah :**

  Kurangnya atau keterbatasan peralatan dapat diatasi dengan memberikan pengajuan bantuan kepada pemerintah provinsi maupun pusat, sedangkan keterbatasan tenaga diatasi dengan melibatkan relawan, unsur Muspika dan masyarakat dalam melakukan penanganan.

- **Rencana Tindak Lanjut :**

  Peningkatan kinerja penanggulangan bencana dengan terus meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan mencukupi kebutuhan peralatan penanggulangan bencana serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penta helix (pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media masa).

c) Capaian indikator kinerja **Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan** pada tahun 2020 adalah 0%.

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui penyusunan dokumen R3 (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi) oleh BPBD Kabupaten Madiun bersama instansi terkait dan disahkan oleh kepala daerah yaitu Bupati Madiun. Dalam proses penyusunan dokumen R3 dilakukan perhitungan kebutuhan pasca bencana dengan menghitung tingkat kerusakan yang dialami akibat dampak bencana. Pada tahun 2019. Dokumen ini telah disusun dan diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mendapat persetujuan sebanyak 5 titik lokasi yang mengalami kerusakan pasca bencana Banjir Tahun 2019, dan akan dilaksanakan perbaikan di Tahun Anggaran 2021.

- **Permasalahan :**

  Adanya rasionaliasi da refocusing anggaran untuk prioritas kegiatan pencegahan penularan Covid - 19

- **Strategi Pemecahan Masalah :**

  Penyusunan dan pengajuan proposal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Tahun 2019 kepada BNPB

- **Rencana Tindak Lanjut :**

  Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai perencanaan yang telah disetujui pada tahun anggaran berikutnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Program Penanggulangan Bencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.691.206.950,- terealisasi sebesar Rp. 1.661.000.451,- atau 98%. Program ini terdiri atas kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 870.067.050,- terealisasi Rp. 858.104.451,- atau 99% , Kegiatan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan jumlah anggaran Rp. 325.620.000,- terealissi Rp. 316.084.000,- atau 97%, Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruski Penanggulangan Bencana dengan jumlah anggaran Rp. 7.832.600 terealisasi sebesar Rp. 7.622.000,- atau 97%, Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana pada Masa Pandemi Covid – 19 dengan jumlah anggaran Rp. 63.582.900,- teralisasi sebesar Rp. 55.750.000,- atau 88%, serta Kegiatan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana pada Masa Pandemi Covid – 19 dengan jumlah anggaran Rp. 424.104.400,- terealisasi sebesar Rp. 423.440.000,- atau 99%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
BELANJA	**3.996.876.038,00**	**3.578.100.853,00**	**89,52**
BELANJA OPERASI	**3.831.050.238,00**	**3.413.439.853,00**	**89,10**
Belanja Pegawai	1.643.694.200,00	1.272.795.139,00	77,44
Belanja Barang dan Jasa	2.187.356.038,00	2.140.644.714,00	97,86
BELANJA MODAL	**165.825.800,00**	**164.661.000,00**	**99,30**
Belanja Peralatan dan Mesin	165.825.800,00	164.661.000,00	99,30
SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.996.876.038,00)**	**(3.578.100.853,00)**	**89,52**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(3.996.876.038,00)**	**(3.578.100.853,00)**	**89,52**

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)	% Capaian Anggaran	EFISIENSI
1.	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1. Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	350 Orang	1.500 Orang	428%	933.649.950	913.854.451	97,9	330,1%
		2. Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%	100%	100%	749.724.400	739.524.000	98,6	1,4%
		3. Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	100%	0%	0%	7.832.600	7.622.000	97,3	-97,3%

Tingkat efisiensi kinerja BPBD Kabupaten Madiun seperti digambarkan pada tabel di atas. Pada indikator Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana memiliki tingkat efisiensi yang tinggi hingga melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 330,1%, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan pelatihan bencana tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan yang sudah ditargetkan, namun BPBD Kabupaten Madiun berinisiatif untuk menggalang partisipasi pemerintah desa untuk secara mandiri dengan didampingi melakukan pelatihan dengan membentuk desa tangguh bencana dan terbentuk sebanyak 30 desa tangguh bencana yang melibatkan 1.500 orang. Sedangkan untuk indikator persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan tingkat efisisensinya rendah yaitu – 97% disebabkan karena belum dapat terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. kegiatan ini sudah mengahsilkan penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3) dan telah dilakukan verifikasi lapangan oleh pemerintah pusat dan provinsi dalam hal ini BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur, namun masih menunggu proses penganggaran di Kementerian Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 disusun sebagai wujud komitmen dalam upaya melaksanakan pembangunan di bidang Kebencanaan menuju pada tata kepemerintahan yang baik atau *Good Governance*. LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini merupakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023. Program Dan Kegiatan yang telah dilaksanakan mengarah pada pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Madiun maupun Renstra BPBD Kabupaten Madiun sesuai dengan Misi dan tujuan yang hendak dicapai. Meskipun sebagian besar sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun beberapa kekurangan pencapaian target yang belum terpenuhi perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Madiun yang kami susun dengan harapan untuk tahun berikutnya lebih baik dan bermanfaat bagi pelayanan masyarakat utamanya dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bahaya terhadap bencana.

LAMPIRAN